



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1066 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1005 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri telah ditetapkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negera Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI.

KESATU : Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


KEDUA : Standar Biaya Perjalanan Dinas berfungsi sebagai :

- a. estimasi; atau
- b. batas tertinggi.

- KETIGA : a. Standar Biaya yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- b. Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri; dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 1005 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1066 TAHUN 2018
Tanggal 18 Juli 2018

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama (One Way)

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kota/Kabupaten tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan :

Dalam hal Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke suatu Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (at cost) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten Sekitar (One Way)

Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten Sekitar merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten sekitar menggunakan metode at cost.

3. Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi darat dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri sekitar menggunakan metode at cost.

Contoh penghitungan alokasi biaya transportasi :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Berangkat

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan

- 2) satuan biaya transportasi dari Bandara Kualanamu (Sumut) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali

- 1) satuan biaya transportasi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumut) ; dan
- 2) satuan biaya transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

5. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.

Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit) , bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1066 TAHUN 2018

Tanggal 18 Juli 2018

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBUKOTA PROVINSI KE KOTA/KABUPATEN DALAM
PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran	Keterangan
	ACEH			Biaya Transportasi
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	275.000	Perjalanan Dinas
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	298.000	Dalam Negeri dari
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	183.000	Ibukota Provinsi ke
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	238.000	Kota Kabupaten
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	325.000	dalam Provinsi
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	420.000	dibayarkan secara
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	315.000	riil
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	293.000	
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	460.000	
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	289.000	
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	270.000	
12	Banda Aceh	Kab. Aceh Bener Merah	278.000	
13	Banda Aceh	Kab. Aceh Bireuen	220.000	
14	Banda Aceh	Kab. Aceh Gayo Lues	370.000	
15	Banda Aceh	Kab. Aceh Nagan Jaya	275.000	
16	Banda Aceh	Kab. Aceh Pidie	190.000	
17	Banda Aceh	Kab. Aceh Pidie Jaya	205.000	
18	Banda Aceh	Kota Langsa	301.000	
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	240.000	
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	400.000	
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	259.000	
22	Medan	Kab. Batubara	225.000	
23	Medan	Kab. Dairi	270.000	
24	Medan	Kab. Deli Serdang	186.000	
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	300.000	
26	Medan	Kab. Karo	200.000	
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	287.000	
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	360.000	
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	300.000	
30	Medan	Kab. Langkat	186.000	
31	Medan	Kab. Mandailing	420.000	
32	Medan	Kab. Mandailing Natal	420.000	
33	Medan	Kab. Padang Lawas	420.000	
34	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	420.000	
35	Medan	Kab. Pakpak Bharat	300.000	
36	Medan	Kab. Samosir	330.000	
37	Medan	Kab. Serdang Bedagai	200.000	
38	Medan	Kab. Simalungun	264.000	
39	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	328.000	
40	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	345.000	
41	Medan	Kab. Tapanuli Utara	330.000	
42	Medan	Toba Samosir	300.000	
43	Medan	Kota. Binjai	180.000	
44	Medan	Kota. Pematang Siantar	225.000	
45	Medan	Kota. Sibolga	345.000	
46	Medan	Kota. Tanjung Balai	285.000	
47	Medan	Kota. Tebing Tinggi	203.000	
	RIAU			
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	380.000	
49	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	315.000	
50	Pekanbaru	Kab. Kampar	200.000	
51	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	300.000	

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran	Keterangan
52	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	225.000	
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	350.000	
54	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	322.000	
55	Pekanbaru	Kab. Siak	350.000	
56	Pekanbaru	Kab. Dumai	400.000	
KEPULAUAN RIAU				
57	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	185.000	
JAMBI				
58	Jambi	Kab. Batanghari	175.000	
59	Jambi	Kab. Bungo	270.000	
60	Jambi	Kab. Kerinci	325.000	
61	Jambi	Kab. Merangin	260.000	
62	Jambi	Kab. Muaro Jambi	170.000	
63	Jambi	Kab. Sarolangun	241.000	
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	225.000	
65	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.000	
66	Jambi	Kab. Tebo	250.000	
67	Jambi	Kab. Sungai Penuh	308.000	
SUMATERA BARAT				
68	Padang	Kab. Agam	225.000	
69	Padang	Kab. Dharmasraya	250.000	
70	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	225.000	
71	Padang	Kab. Padang Pariaman	205.000	
72	Padang	Kab. Pasaman	250.000	
73	Padang	Kab. Pasaman Barat	250.000	
74	Padang	Kab. Pesisir Selatan	205.000	
75	Padang	Kab. Sijunjung	225.000	
76	Padang	Kab. Solok	210.000	
77	Padang	Kab. Solok Selatan	250.000	
78	Padang	Kab. Tanah Datar	220.000	
79	Padang	Kota. Bukit Tinggi	215.000	
80	Padang	Kota. Padang Panjang	210.000	
81	Padang	Kota. Pariaman	200.000	
82	Padang	Kota. Payakumbuh	225.000	
83	Padang	Kota. Sawahlunto	215.000	
84	Padang	Kota. Solok	210.000	
SUMATERA SELATAN				
85	Palembang	Kab. Banyuasin	203.000	
86	Palembang	Kab. Empat Lawang	315.000	
87	Palembang	Kab. Lahat	250.000	
88	Palembang	Kab. Muara Enim	235.000	
89	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	235.000	
90	Palembang	Kab. Musi Rawas	320.000	
91	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	325.000	
92	Palembang	Kab. Ogan Ilir	205.000	
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	248.000	
94	Palembang	Kab. Organ Komering Ulu Selatan	250.000	
95	Palembang	Kab. Organ Komering Ulu Timur	245.000	
96	Palembang	Kab. Pali	265.000	
97	Palembang	Kota. Lubuk Linggau	290.000	
98	Palembang	Kota. Pagar Alam	280.000	
99	Palembang	Kota. Prabumulih	205.000	
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	270.000	
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	234.000	
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	246.000	

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran	Keterangan
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	246.000	
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	252.000	
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	276.000	
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	216.000	
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	200.000	
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	222.000	
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	240.000	
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	252.000	
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	267.000	
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	270.000	
113	Bandar Lampung	Kota. Metro	234.000	
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	275.000	
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	185.000	
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	250.000	
117	Bengkulu	Kab. Kaur	308.000	
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	238.000	
119	Bengkulu	Kab. Lebong	300.000	
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	338.000	
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	250.000	
122	Bengkulu	Kab. Seluma	225.000	
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	250.000	
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	275.000	
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	275.000	
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	250.000	
JAWA TENGAH				
127	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000	
128	Semarang	Kab. Banyumas	257.000	
129	Semarang	Kab. Batang	240.000	
130	Semarang	Kab. Blora	270.000	
131	Semarang	Kab. Boyolali	240.000	
132	Semarang	Kab. Brebes	263.000	
133	Semarang	Kab. Cilacap	280.000	
134	Semarang	Kab. Demak	230.000	
135	Semarang	Kab. Grobogan	235.000	
136	Semarang	Kab. Jepara	240.000	
137	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000	
138	Semarang	Kab. Kebumen	260.000	
139	Semarang	Kab. Kendal	230.000	
140	Semarang	Kab. Klaten	250.000	
141	Semarang	Kab. Kudus	235.000	
142	Semarang	Kab. Magelang	240.000	
143	Semarang	Kab. Pati	240.000	
144	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000	
145	Semarang	Kab. Pemalang	250.000	
146	Semarang	Kab. Prubalingga	270.000	
147	Semarang	Kab. Purworejo	250.000	
148	Semarang	Kab. Rembang	250.000	
149	Semarang	Kab. Semarang	230.000	
150	Semarang	Kab. Sragen	250.000	
151	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000	
152	Semarang	Kab. Tegal	260.000	
153	Semarang	Kab. Temanggung	240.000	
154	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000	
155	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000	
156	Semarang	Kota. Magelang	240.000	
157	Semarang	Kota. Pekalongan	245.000	
158	Semarang	Kota. Salatiga	235.000	
159	Semarang	Kota. Surakarta	245.000	
160	Semarang	Kota. Tegal	260.000	


No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran	Keterangan
D.I YOGYAKARTA				
161	Yogyakarta	Kab. Bantul	50.000	
162	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	250.000	
163	Yogyakarta	Kab. Kulonprogo	200.000	
164	Yogyakarta	Kab. Sleman	50.000	
JAWA TIMUR				
165	Surabaya	Kab. Bangkalan	225.000	
166	Surabaya	Kab. Banyuwangi	285.000	
167	Surabaya	Kab. Bondowoso	255.000	
168	Surabaya	Kab. Gresik	225.000	
169	Surabaya	Kab. Jember	261.000	
170	Surabaya	Kab. Jombang	235.000	
171	Surabaya	Kab. Lamongan	225.000	
172	Surabaya	Kab. Lumajang	261.000	
173	Surabaya	Kab. Magetan	253.000	
174	Surabaya	Kab. Nganjuk	245.000	
175	Surabaya	Kab. Ngawi	253.000	
176	Surabaya	Kab. Pacitan	285.000	
177	Surabaya	Kab. Pamekasan	243.000	
178	Surabaya	Kab. Pasuruan	228.000	
179	Surabaya	Kab. Ponorogo	255.000	
180	Surabaya	Kab. Sampang	235.000	
181	Surabaya	Kab. Sidoarjo	240.000	
182	Surabaya	Kab. Situbondo	255.000	
183	Surabaya	Kab. Sumenep	255.000	
184	Surabaya	Kab. Trenggalek	245.000	
185	Surabaya	Kab. Tuban	245.000	
186	Surabaya	Kab. Tulungagung	245.000	
187	Surabaya	Kota. Batu	242.000	
188	Surabaya	Kota. Blitar	255.000	
189	Surabaya	Kota. Bojonegoro	225.000	
190	Surabaya	Kota. Kediri	235.000	
191	Surabaya	Kota. Madiun	245.000	
192	Surabaya	Kota. Malang	228.000	
193	Surabaya	Kota. Mojokerto	225.000	
194	Surabaya	Kota. Probolinggo	228.000	
BALI				
195	Denpasar	Kab. Badung	188.000	
196	Denpasar	Kab. Bangli	225.000	
197	Denpasar	Kab. Buleleng	265.000	
198	Denpasar	Kab. Gianyar	225.000	
199	Denpasar	Kab. Jembrana	270.000	
200	Denpasar	Kab. Karangasem	263.000	
201	Denpasar	Kab. Tabanan	225.000	
NUSA TENGGARA BARAT				
202	Mataram	Kab. Lombok Barat	325.000	
203	Mataram	Kab. Lombok Tengah	450.000	
204	Mataram	Kab. Lombok Timur	350.000	
NUSA TENGGARA TIMUR				
205	Kupang	Kab. Belu	325.000	
206	Kupang	Kab. Kupang	175.000	
207	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	218.000	
208	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	275.000	
KALIMANTAN BARAT				
209	Pontianak	Kab. Bengkayang	270.000	
210	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	550.000	
211	Pontianak	Kab. Kayong Utara	550.000	

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran	Keterangan
212	Pontianak	Kab. Ketapang	550.000	
213	Pontianak	Kab. Landak	270.000	
214	Pontianak	Kab. Melawi	430.000	
215	Pontianak	Kab. Mempawah	230.000	
216	Pontianak	Kab. Sambas	300.000	
217	Pontianak	Kab. Sanggau	303.000	
218	Pontianak	Kab. Sekadau	343.000	
219	Pontianak	Kab. Sintang	392.000	
220	Pontianak	Kota. Singkawang	257.000	
KALIMANTAN TENGAH				
221	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	290.000	
222	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	333.000	
223	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	425.000	
224	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	300.000	
225	Palangkaraya	Kab. Kapuas	275.000	
226	Palangkaraya	Kab. Katingan	250.000	
227	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	425.000	
228	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	300.000	
229	Palangkaraya	Kab. Lumandau	525.000	
230	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	448.000	
231	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	250.000	
232	Palangkaraya	Kab. Seruyan	328.000	
233	Palangkaraya	Kab. Sukamara	525.000	
KALIMANTAN SELATAN				
234	Banjarmasin	Kab. Balangan	230.000	
235	Banjarmasin	Kab. Banjar	170.000	
236	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	200.000	
237	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	200.000	
238	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	212.000	
239	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	218.000	
240	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	290.000	
241	Banjarmasin	Kab. Tabalong	234.000	
242	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	300.000	
243	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	200.000	
244	Banjarmasin	Kab. Tapin	189.000	
245	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	225.000	
KALIMANTAN TIMUR				
246	Samarinda	Kab. Kutai Barat	1.500.000	
247	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	500.000	
248	Samarinda	Kab. Kutai Timur	1.350.000	
249	Samarinda	Kab. Paser	1.650.000	
250	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	650.000	
251	Samarinda	Kab. Balikpapan	550.000	
252	Samarinda	Kab. Bontang	600.000	
SULAWESI UTARA				
253	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	250.000	
254	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	275.000	
255	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	250.000	
256	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	300.000	
257	Manado	Kab. Minahasa	180.000	
258	Manado	Kab. Minahasa Selatan	180.000	
259	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	200.000	
260	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000	
261	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000	
262	Manado	Kab. Kotamobagu	250.000	
263	Manado	Kab. Tomohon	170.000	

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran	Keterangan
GORONTALO				
264	Gorontalo	Kab. Boalemo	400.000	
265	Gorontalo	Kab. Gorontalo	280.000	
266	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	650.000	
267	Gorontalo	Kab. Pahuwato	350.000	
SULAWESI BARAT				
268	Mamuju	Kab. Majene	240.000	
269	Mamuju	Kab. Mamasa	359.000	
270	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	200.000	
271	Mamuju	Kab. Mamaju Utara	270.000	
272	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	260.000	
SULAWESI SELATAN				
273	Makasar	Kab. Banteang	235.000	
274	Makasar	Kab. Barru	210.000	
275	Makasar	Kab. Bone	240.000	
276	Makasar	Kab. Bulukumba	240.000	
277	Makasar	Kab. Enrekang	250.000	
278	Makasar	Kab. Gowa	175.000	
279	Makasar	Kab. Jeneponto	230.000	
280	Makasar	Kab. Luwu	350.000	
281	Makasar	Kab. Luwu Timur	375.000	
282	Makasar	Kab. Luwu Utara	365.000	
283	Makasar	Kab. Maros	170.000	
284	Makasar	Kab. Pinrang	230.000	
285	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	230.000	
286	Makasar	Kab. Sinjai	235.000	
287	Makasar	Kab. Soppeng	235.000	
288	Makasar	Kab. Takalar	190.000	
289	Makasar	Kab. Tanatoraja	350.000	
290	Makasar	Kab. Toraja Utara	350.000	
291	Makasar	Kab. Wajo	30.000	
292	Makasar	Kota.Palopo	350.000	
293	Makasar	Kota.Pare-Pare	225.000	
SULAWESI TENGAH				
294	Palu	Kab. Buol	472.000	
295	Palu	Kab. Luwuk	387.000	
296	Palu	Kab. Morowali	380.000	
297	Palu	Kab. Morowali Utara	350.000	
298	Palu	Kab. Parigi Moutong	250.000	
299	Palu	Kab. Poso	280.000	
300	Palu	Kab. Sigi	219.000	
301	Palu	Kab. Tojouna-Una	340.000	
302	Palu	Kab. Konawe Utara	412.000	
SULAWESI TENGGARA				
303	Kendari	Kab. Bombana	355.000	
304	Kendari	Kab. Kolaka	370.000	
305	Kendari	Kab. Kolaka Timur	300.000	
306	Kendari	Kab. Kolaka Utara	425.000	
307	Kendari	Kab. Konawe	300.000	
308	Kendari	Kab. Konawe Selatan	305.000	
309	Kendari	Kab. Konawe Utara	300.000	
MALUKU UTARA				
310	Sofifi	Kab. Halmahela Barat	850.000	
311	Sofifi	Kab. Halmahela Tengah	1.000.000	
312	Sofifi	Kab. Halmahela Timur	1.250.000	
313	Sofifi	Kab. Halmahela Utara	900.000	

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran	Keterangan
	PAPUA			
314	Jayapura	Kab. Jayapura	600.000	
315	Jayapura	Kab. Sarmi	2.700.000	
316	Jayapura	Kab. Keeron	900.000	
317	Jayapura	Kab. Merauke	1.134.000	
	PAPUA BARAT			
318	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	900.000	
319	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	750.000	
320	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	2.650.000	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ames Baswedan

AMES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1066 TAHUN 2018
Tanggal 18 Juli 2018

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA KE WILAYAH KOTA/
KABUPATEN BANTEN DAN JAWA BARAT

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Kota Bandung	763.470	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri pergi pulang dibayarkan secara riil
2	Kota Serang	409.180	
3	Kab. Bandung	878.240	
4	Kab. Bandung Barat	693.610	
5	Kab. Ciamis	1.342.310	
6	Kab. Cianjur	1.047.900	
7	Kab. Garut	1.097.800	
8	Kab. Indramayu	1.132.730	
9	Kab. Karawang	374.250	
10	Kab. Kuningan	1.272.450	
11	Kab. Majalengka	958.080	
12	Kab. Pangandaran	1.681.630	
13	Kab. Purwakarta	474.050	
14	Kab. Subang	638.720	
15	Kab. Sukabumi	563.870	
16	Kab. Sumedang	1.022.950	
17	Kab. Tasikmalaya	1.307.380	
18	Kota Banjar	583.830	
19	Kota Cimahi	718.560	
20	Kota Cirebon	1.102.790	
21	Kota Sukabumi	563.870	
22	Kab. Lebak	548.900	
23	Kab. Pandeglang	988.020	
24	Kab. Cilegon	528.940	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1066 TAHUN 2018
Tanggal 18 Juli 2018

A. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KANTOR TEMPAT KEDUDUKAN MENUJU
BANDARA KEBERANGKATAN

No.	Bandara	Satuan	Biaya Transportasi (Rp)	Keterangan
1	Bandara Soekarno-Hatta	Orang/Kali	213.000	Biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Kantor Tempat Kedudukan Menuju Bandara Keberangkatan dan sebaliknya, dibayarkan secara riil.
2	Bandara Halim Perdana Kusuma	Orang/Kali	213.000	

B. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BANDARA KEDATANGAN MENUJU KE TEMPAT
TUJUAN DAN SEBALIKNYA

No.	Provinsi	Satuan	Biaya Transportasi (Rp)	Keterangan
1	N.A.D	Orang/Kali	123.000	Biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Bandara Kedatangan ke Tempat Tujuan dan Sebaliknya, dibayarkan secara riil
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000	
3	Riau	Orang/Kali	94.000	
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000	
5	Jambi	Orang/Kali	147.000	
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000	
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000	
8	Lampung	Orang/Kali	167.000	
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000	
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000	
11	Banten	Orang/Kali	446.000	
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000	
13	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000	
14	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	118.000	
15	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000	
16	Bali	Orang/Kali	159.000	
17	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000	
18	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000	
19	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000	
20	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000	
21	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000	
22	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000	
23	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000	
24	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000	
25	Gorontalo	Orang/Kali	240.000	
26	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000	
27	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000	

No.	Provinsi	Satuan	Biaya Transportasi (Rp)	Keterangan
28	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000	
29	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000	
30	Maluku	Orang/Kali	240.000	
31	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000	
32	Papua	Orang/Kali	431.000	
33	Papua Barat	Orang/Kali	182.000	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1066 TAHUN 2018
Tanggal 18 Juli 2018

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)		Keterangan
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000	<p>1. Kelas Bisnis : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I</p> <p>2. Kelas Ekonomi : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II ke bawah, PPPK dan Bukan Pegawai</p> <p>3. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara riil melalui bukti pembayaran yang sah</p>
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000	
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000	
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000	
5	JAKARTA	BANJARMSIN	5.252.000	2.995.000	
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000	
7	JAKARTA	BENGGULU	4.364.000	2.621.000	
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000	
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000	
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000	
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000	
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000	
13	JAKARTA	JOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000	
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000	
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000	
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000	
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000	
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000	
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000	
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000	

1	2	3	4	5	5
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000	
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000	
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000	
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000	
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000	
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000	
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000	
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000	
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000	
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000	
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000	
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000	
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000	
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran VI : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1066 TAHUN 2018
Tanggal 18 Juli 2018

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
PERGI PULANG (PP)

(dalam US\$)

No	Kota	Satuan Biaya Tiket			Keterangan
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
AMERIKA UTARA					1. Kelas Utama : Gubernur, Wakil Gubernur Pimpinan DPRD 2. Kelas Bisnis : Pejabat Eselon I 3. Kelas Ekonomi : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II ke bawah, PPPK serta Bukan Pegawai
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
AMERIKA SELATAN					4. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan lama Perjalanan 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi Pejabat Eselon III keatas atau Fungsional tertentu Tingkat Madya yang setara dapat menggunakan kelas Bisnis
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
AMERIKA TENGAH					5. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri dibayarkan secara riil (at cost)
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
EROPA BARAT					
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	

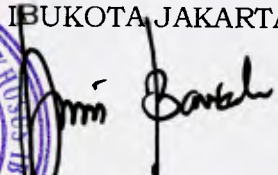
No	Kota	Satuan Biaya Tiket			Keterangan
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
EROPA UTARA					
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
EROPA SELATAN					
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
EROPA TIMUR					
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
AFRIKA BARAT					
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
AFRIKA TIMUR					
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
AFRIKA SELATAN					
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	
AFRIKA UTARA					
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	


No	Kota	Satuan Biaya Tiket			Keterangan
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
ASIA BARAT					
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
ASIA TENGAH					
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Baku	13.234	8.556	2.281	
ASIA TIMUR					
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
ASIA SELATAN					
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
ASIA TENGGARA					
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	

No	Kota	Satuan Biaya Tiket			Keterangan
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Bahru	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapore	991	673	403	
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhla	2.344	1.155	823	
122	Kuching	2.659	1.900	364	
ASIA PASIFIK					
123	Canberra	6.304	6.304	2.500	
124	Darwin	6.689	4.900	3.964	
125	Melbourne	4.886	3.814	2.858	
126	Noumea	6.940	5.917	1.916	
127	Perth	5.771	1.801	1.525	
128	Port Moresby	17.090	17.090	13.835	
129	Sydney	4.629	4.237	2.557	
130	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
131	Wellington	11.750	9.830	4.120	
132	Suva	12.668	4.461	2.669	

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD APABILA TIDAK
MEMAKAI PESAWAT TERBANG

No	Pejabat Negara	Moda Transportasi		Lainnya
		Kapal Laut	Kereta Api/Bus	
1	Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara	VIP/Kelas I A	Spesial/Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Pejabat Lainnya yang setara	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, ASN dan non ASN	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



Lampiran VII : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1066 TAHUN 2018
Tanggal 18 Juli 2018

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, pejabat eselon I, Anggota DPRD dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

4. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau

- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran VIII : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 1066 TAHUN 2018
Tanggal 18 Juli 2018

A. DAFTAR SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TUJUAN SELURUH PROVINSI DI WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA KECUALI PROVINSI BANTEN DAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Satuan	Besaran (Rp)	KETERANGAN
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.000.000	Uang harian perjalanan dinas
2	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	4.500.000	dalam negeri dibayarkan secara
3	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	4.000.000	lumpsum
4	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	Orang/Hari	2.500.000	
5	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol III	Orang/Hari	2.000.000	
6	Pegawai Gol II, Gol I, PPPK dan Bukan Pegawai	Orang/Hari	1.000.000	

B. DAFTAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI KHUSUS TUJUAN PROVINSI BANTEN DAN PROVINSI
JAWA BARAT

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD	Orang/Hari	1.500.000	Uang harian perjalanan dinas
2	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	1.350.000	dalam negeri dibayarkan secara
3	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1.200.000	lumpsum
4	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	Orang/Hari	750.000	
5	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol III	Orang/Hari	600.000	
6	Pegawai Gol II, Gol I, PPPK dan Bukan Pegawai	Orang/Hari	300.000	


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Ami Baswedan
ANIES BASWEDAN

DAFTAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No.	Negara	Ibukota/Kota Tempat Perwakilan RI	Uang Harian				Keterangan
			Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	
1	2	3	4	5	6	7	(dalam US\$)
AMERIKA UTARA							
1	Amerika Serikat	Washington DC	578	513	440	382	
2	Kanada	Ottawa	447	404	368	307	
AMERIKA SELATAN							
3	Argentina	Buenos Aires	534	402	351	349	
4	Venezuela	Caracas	557	388	344	343	
5	Brazil	Brasilia	436	341	291	241	
6	Chile	Santiago	415	316	270	222	
7	Columbia	Columbia	436	323	276	254	
8	Peru	Lima	459	347	320	276	
9	Suriname	Paramaribo	398	295	252	207	
10	Ekuador	Quito	385	273	242	241	
AMERIKA TENGAH							
11	Mexico	Mexico City	493	366	324	323	
12	Kuba	Havana	406	305	261	221	
13	Panama	Panama	414	342	306	271	
EROPA BARAT							
14	Austria	Vienna	504	453	318	317	
15	Belgia	Brussels	466	419	282	281	
<p>I. Biaya Uang Harian</p> <p>Biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di Luar Negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, tanspor lokal, uang saku dan uang penginapan. Biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri dibayarkan secara lumpsum</p> <p>II. Golongan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri</p> <p>1. GOLONGAN A :</p> <p>Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I</p> <p>2. GOLONGAN B :</p> <p>Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	
16	Perancis	Paris	512	464	382	381	3. GOLONGAN C : Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pegawai Gol IV	
17	Rep. Federasi Jerman	Berlin	447	415	285	285		
18	Belanda	Amsterdam	463	416	272	271		
19	Swiss	Geneva	636	570	403	401		
EROPA UTARA								
20	Denmark	Kopenhagen	567	491	343	301		
21	Finlandia	Helsinki	453	409	354	313		
22	Norwegia	Oslo	621	559	389	386		
23	Swedia	Stockholm	466	436	342	341		
24	Kerajaan Inggris	London	792	774	583	582		
EROPA SELATAN								
25	Bosnia Herzegovina	Sarajevo	456	420	334	333		
26	Kroasia	Zagreb	555	506	406	405		
27	Spanyol	Madrid	457	413	287	286		
28	Yunani	Athens	422	379	242	241		
29	Italia	Roma	702	637	446	427		
30	Portugal	Lisbon	425	382	242	241		
31	Serbia	Beograd	417	375	326	288		
EROPA TIMUR								
32	Bulgaria	Sofia	406	367	320	284		
33	Czech	Praha	618	526	447	367		
34	Hongaria	Budapest	485	438	390	345		
35	Polandia	Warsawa	461	415	360	319		
36	Rumania	Bucharest	416	381	313	277		
37	Rusia	Moscow	556	512	407	406		
38	Slovakia	Bratislava	437	394	341	303		
39	Ukraina	Kiev	485	436	375	331		
4. GOLONGAN D : Pegawai Golongan III ke bawah, PPPK dan Bukan Pegawai								

1	2	3	4	5	6	7	8
AFRIKA BARAT							
40	Nigeria	Abuja	361	313	292	291	
41	Senegal	Dakkar	384	317	237	231	
AFRIKA TIMUR							
42	Ethiopia	Addis Ababa	358	295	221	193	
43	Kenya	Nairobi	384	317	237	225	
44	Madagaskar	Antananarive	296	244	182	181	
45	Tanzania	Dar Es Salaam	350	290	244	218	
46	Zimbabwe	Harare	328	281	248	247	
47	Mozambique	Maputo	399	329	265	264	
AFRIKA SELATAN							
48	Namibia	Windhoek	405	334	268	233	
49	Afrika Selatan	Cape Town	380	313	253	251	
AFRIKA UTARA							
50	Aljazair	Aljazair	342	308	287	286	
51	Mesir	Cairo	409	303	235	211	
52	Maroko	Rabbat	304	251	192	191	
53	Tunisia	Tunisia	293	241	187	186	
54	Sudan	Khartoum	342	282	210	184	
55	Libya	Tripoli	308	254	189	165	
ASIA BARAT							
56	Azerbaijan	Baku	498	459	365	364	
57	Bahrain	Manama	416	294	228	214	
58	Irak	Baghdad	447	325	253	231	
59	Yordania	Amman	406	292	236	225	
60	Kuwait	Kuwait	456	325	296	294	

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Libanon	Beirut	357	267	207	186	
62	Qatar	Doha	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	Damascus	358	257	200	196	
64	Turki	Istanbul	456	364	283	253	
65	Pst. Arab Emirat	Abu Dhabi	459	323	302	301	
66	Yaman	Sanaa	353	241	197	196	
67	Saudi Arabia	Jeddah	450	331	269	251	
68	Kesultanan Oman	Muscat	413	292	247	249	
ASIA TIMUR							
69	Rep. Rakyat Cina	Beijing	378	238	207	206	
70	Hongkong	Hoongkong	472	320	287	286	
71	Jepang	Tokyo	519	303	262	261	
72	Korea Selatan	Seoul	421	326	297	296	
73	Korea Utara	Pyongyang	494	321	300	278	
ASIA SELATAN							
74	Afganistan	Kaboul	385	226	173	172	
75	Bangladesh	Dhaka	339	196	167	166	
76	India	New Delhi	422	329	327	325	
77	Pakistan	Islamabad	343	203	182	181	
78	Sri Lanka	Colombo	380	242	209	199	
79	Iran	Teheran	421	312	243	217	
ASIA TENGAH							
80	Uzbekistan	Tashkent	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	Astana	456	420	334	333	
ASIA TENGGARA							
82	Philippina	Manila	412	278	222	221	
83	Singapura	Singapura	530	363	279	276	
84	Malaysia	Kuala Lumpur	394	262	219	218	
85	Thailand	Bangkok	392	275	211	201	

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Myanmar	Yangon	368	250	197	196	
87	Laos	Vientiane	380	262	202	196	
88	Vietnam	Ho Chi Minh	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan	374	256	197	196	
90	Kamboja	Pnom Penh	296	223	197	196	
91	Timor Leste	Dili	392	354	229	196	
ASIA PASIFIK							
92	Australia	Canberra	636	585	394	393	
93	Selandia Baru	Wellington	451	308	278	276	
94	Kaledonia Baru	Noumea	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	Port Moresby	520	476	319	259	
96	Fiji	Suva	363	329	221	179	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ANIES BASWEDAN


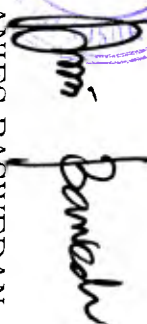
Lampiran X : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1066 TAHUN 2018
Tanggal 18 Juli 2018

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Tarif Penginapan Kota Tujuan					Keterangan
		Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)	Kelas D (Rp)	Kelas E (Rp)	
1	N.A.D	4.420.000	3.256.000	1.294.000	556.000	556.000	1. Kelas A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I 2. Kelas B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 3. Kelas C : Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 4. Kelas D : Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III dan 5. Kelas E : Pegawai Gol II, Gol I, dan Bukan Pegawai Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara riil (at cost)
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000	
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000	
7	Sumatera Selatan	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000	
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000	
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
13	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000	
14	D.I Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
15	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
16	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
17	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
18	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
19	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	
20	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
21	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	

No.	Provinsi	Tarif Penginapan Kota Tujuan					Keterangan
		Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)	Kelas D (Rp)	Kelas E (Rp)	
22	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
23	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
24	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	
25	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000	
26	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000	
28	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	
29	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000	
30	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	
31	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000	
32	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000	
33	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000	


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN

Lampiran XI : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1066 TAHUN 2018
Tanggal 18 Juli 2018

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No.	Provinsi	Satuan	Kendaraan			Keterangan
			Roda 4 (Rp)	Roda 6/bus sedang (Rp)	Roda 6/bus besar (Rp)	
1	Aceh	Per hari	795.000	3.282.000	4.588.000	<p>Diperuntukkan bagi :</p> <p>a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar (lebih dari 5 orang), dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi</p> <p>c. Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara riil (at cost)</p>
2	Sumatera Utara	Per hari	888.000	1.950.000	2.920.000	
3	Riau	Per hari	875.000	2.332.000		
4	Kepulauan Riau	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000	
5	Jambi	Per hari	710.000	3.048.000	4.063.000	
6	Sumatera Barat	Per hari	700.000	1.900.000	3.050.000	
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.094.000	1.987.000	3.700.000	
8	Lampung	Per hari	764.000	2.875.000	4.563.000	
9	Bengkulu	Per hari	710.000	3.048.000	4.719.000	
10	Bangka Belitung	Per hari	159.000	2.563.000	3.938.000	
11	Banten	Per hari	700.000	2.009.000	3.306.000	
12	Jawa Barat	Per hari	845.000	2.050.000	3.087.000	
13	Jawa Tengah	Per hari	875.000	1.900.000	3.650.000	
14	DI Yogyakarta	Per hari	799.000	1.950.000	3.150.000	
15	Jawa Timur	Per hari	875.000	2.216.000	2.920.000	
16	Bali	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000	
17	Nusa Tenggara Barat	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000	
18	Nusa Tenggara Timur	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000	
19	Kalimantan Barat	Per hari	798.000	224.000	3.350.000	
20	Kalimantan Tengah	Per hari	1.029.000	3.716.000	4.875.000	
21	Kalimantan Selatan	Per hari	710.000	2.438.000	3.150.000	

No.	Provinsi	Satuan	Kendaraan			Keterangan
			Roda 4 (Rp)	Roda 6 / bus sedang (Rp)	Roda 6 / bus besar (Rp)	
22	Kalimantan Timur	Per hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000	
23	Kalimantan Utara	Per hari	1.013.000	2.170.000	3.560.000	
24	Sulawesi Utara	Per hari	888.000	2.050.000	3.460.000	
25	Gorontalo	Per hari	740.000	1.950.000	3.020.000	
26	Sulawesi Barat	Per hari	710.000	2.267.000	3.020.000	
27	Sulawesi Selatan	Per hari	700.000	2.381.000	3.020.000	
28	Sulawesi Tengah	Per hari	770.000	2.265.000	3.150.000	
29	Sulawesi Tenggara	Per hari	770.000	2.394.000	150.000	
30	Maluku	Per hari	890.000	2.700.000	3.780.000	
31	Maluku Utara	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000	
32	Papua	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000	
33	Papua Barat	Per hari	980.000	3.240.000	4.210.000	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
YOGYAKARTA,
JAKARTA,
Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN